

TIPOLOGI IDENTITAS MUSLIM TIONGHOA DI PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Herwansyah

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

Herwansah_uin@radenfatah.ac.id

Zaki Faddad Syarif Zain

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

Zakifaddad_uin@radenfatah.ac.id

Abstract : This article seeks to describe the existence of the Muslim Chinese in Palembang. So far, the discussion on Chinese Tionghoa always represented by PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) (Persatuan Iman Tauhid Indonesia) or the non muslim Chinese who convert to Islam . However, in the case of Palembang it was found that the Chinese Muslim identity could be divided into two typology, the peranakan Chinese Muslims, the Muslim descendants of China from the 17th and 18th centuries and not from the colonial segregation of colonial politics, but as they recalled their past- social well-established in traditional Islamic society of Palembang. The second group is a converted Chinese, a non-Islamic Chinese convert to Islam. This group is represented by PITI Palembang

Keywords: tionghoa, muslim, Palembang, construction of identity, typology

Abstrak : Artikel ini berupaya menguraikan eksistensi Tionghoa Muslim di Palembang. Selama ini pembahasan mengenai Tionghoa Muslim selalu diwakili oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) (Persatuan Iman Tauhid Indonesia). Namun dalam kasus di Palembang ditemukan bahwasanya identitas Muslim-Tionghoa dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tionghoa Muslim peranakan yaitu keturunan Muslim dari Tiongkok sejak abad ke 17-18 dan bukan dari hasil politik segregasi masa colonial, melainkan seiring upaya mereka mengingat masa lalunya yang memiliki status sosial yang cukup mapan dalam masyarakat Islam tradisional Palembang. Kelompok kedua adalah Tionghoa Muslim konversi yaitu kelompok Tionghoa non Islam yang konversi ke agama Islam. Kelompok ini diwakili oleh PITI Palembang

Kata kunci : tionghoa, muslim, Palembang, konstruksi identitas, tipologi

A. Pendahuluan

Identitas merupakan tema yang sangat cair dan dinamis tidak fix dan dapat juga hybrid. Seperti halnya identitas Melayu Palembang yang sebenarnya merupakan bentuk perpaduan dari budaya Melayu-Jawa dan Tionghoa (Hanafiah, 1990). Terdapat pandangan umum bahwasanya Tionghoa Muslim yang telah ada ketika Muhibbah Cheng Ho pada abad ke 15 M telah melebur menjadi identitas masyarakat atau etnis muslim yang dominan. Di Indonesia terdapat anggapan bahwa Muslim-Tionghoa sebagai identitas tersendiri kemungkinan baru muncul semenjak era kolonialisme seiring dengan tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan berdasar identitas di Indonesia masa 1930'an. Identitas ini tumbuh dengan ditandai oleh organisasi seperti PIT (Persatoean Islam Tionghoa) di Medan dan PMT (Persatoean Moeslim Tionghoa) di Bengkulu yang akhirnya melebur membentuk PITI (Persatoean Islam Tionghoa Indonesia) yang terbentuk pada tahun 1952. Meski begitu, terdapat kesamaan bahwa PITI merupakan organisasi yang awalnya diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa yang konversi dalam Islam. Konteks identitas itu dimunculkan kembali setelah lama hilang, hal itu tidak dapat dilepaskan karena politik segregasi pada masa colonial, dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Ia harus muncul karena memiliki identitas yang hybrid, untuk mendapatkan pengakuan atas kedua identitas yang bercampur.

Dalam kasus di Palembang ditemukan bahwasanya identitas Muslim-Tionghoa dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tionghoa Muslim peranakan yaitu keturunan Muslim dari Tiongkok sejak abad ke 17-18 dan bukan dari hasil politik segregasi masa colonial, melainkan seiring upaya mereka mengingat masa lalunya dan telah memiliki prestise sendiri dalam masyarakat Islam Palembang. Kelompok kedua adalah Tionghoa Muslim konversi yaitu kelompok Tionghoa non Islam yang konversi ke agama Islam. Kelompok ini diwakili oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) (Persatuan Iman Tauhid Indonesia).

B. Komunitas Tionghoa Muslim di Palembang

Konsep Tionghoa Muslim di sini meliputi tiga kategori yang melampaui tiga kronologi. Pertama, Tionghoa Muslim yang hilang, yaitu migrasi awal komunitas Tionghoa Muslim ke Nusantara yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho. Kelompok ini dikatakan hilang karena telah membaur atau berasimilasi secara total dengan penduduk local, bahkan membentuk ikut membentuk identitas dari kelompok local.. Kelompok itu adalah koloni dari Laksamana Cheng Ho yang datang ke Nusantara pada sekitar abad 15.

Kisah ekspedisi laksamana Cheng Ho dari Tiongkok di Nusantara begitu masyhur, di beberapa tempat terdapat peninggalannya, dan yang paling terkenal adalah di daerah Semarang. Tercatat Cheng Ho melakukan pelayarannya ke Samudra Hindia sebanyak tujuh kali selama 28 tahun, dan selama itu ia telah empat kali mendarat di Sriwijaya (Palembang) yaitu pada tahun 1407 M, 1413-1415 M, 1421-1422 M, dan tahun 1431-1433 M.

Cerita pelayaran Cheng Ho ke Nusantara bermula pada tahun 1405 M. Atas perintah Kaisar Ketiga Dinasti Ming, ia melakukan ekspedisi terbesar pada sejarah Tiongkok. Dari Tiongkok ia menuju ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Semenanjung Arab hingga Afrika. Tujuan ekspedisinya adalah mengkampanyekan kebesaran Dinasti Ming di samping menjalin persahabatan dengan negeri-negeri tetangga, dan membawa misi dagang dengan sistem upeti.

Di Nusantara, Cheng Ho mendarat di berbagai kota di Jawa seperti Tuban, Gresik, Semarang dan Sumatera seperti di Perlak, dan Sriwijaya. Dalam ekspedisinya, ia tidak hanya membawa beberapa buah kapal saja. Ia bahkan memimpin antara 300-400 kapal dengan 28.000 orang setiap kali berlayar. Dalam pelayarannya, tidak semua anggotanya mengikuti ke mana Cheng Ho berlayar, sebagian lainnya menetap dan membangun koloni dan memiliki perwakilan Dinasti Ming di daerah yang disinggahinya.

Diungkapkan bahwa Kukang (Palembang) merupakan koloni kedua di luar Jawa di mana Laksamana Cheng Ho membentuk koloni di beberapa daerah di Jawa. Cheng Ho dan rombongannya singgah di Kukang (Palembang) untuk pertama kalinya pada tahun 1407 M. Menurut catatan Ma Huan, penerjemah Cheng Ho yang menemaninya dalam ekspedisi, di Palembang, Laksamana diberikan tugas khusus oleh Kaisar Yong Le untuk membebaskan daerah ini dari kelompok perompak Chen Yuzi, non-Muslim yang berasal dari Fujian. (Parlindungan, 1964). Misi penumpasan bajak laut tersebut adalah untuk mengamankan jalur perdagangan maritime di Nanyang atau Asia Tenggara. Setelah berhasil menumpas perompak Chen Yuzi, menurut Johan Hanafiah, Laksamana Cheng Ho tiga kali singgah di Palembang, namun belum diketemukan catatan yang mengungkapkan tujuan secara pasti maksud kedatangannya. (Hanafiah, 1995)

Ekspedisi Cheng Ho tidak hanya meninggalkan catatan sejarah melainkan juga meninggalkan warisan kebudayaan yang ikut melebur menjadi identitas bersama masyarakat lokal di mana ia membentuk koloni. Bahkan penyebaran agama Islam tidak dapat dilepaskan dari koloni yang dibentuknya. Laksamana Cheng Ho berasal dari suku Hui yang beragama Islam, ia pun ikut serta dalam menyebarkan agama Islam, terutama madzhab Hanafi di tempat-tempat yang dikujuginya.

Koloni Cheng Ho juga membangun masjid ketika mereka singgah di Nusantara, kebanyakan masjid-masjid itu telah roboh. Meski begitu, pengaruh Tionghoa terhadap Islam di Nusantara tidak

dapat diabaikan terutama dalam arsitektur masjid. Masih tersisa beberapa ornamen-ornamen begaya khas Tiongkok menjadi ciri khas masjid-masjid tua di Nusantara seperti menara masjid yang menyerupai pagoda, atap yang melengkung, dan ukiran-ukiran kayu di sejumlah masjid di Jawa dan Sumatera.

Menurut Lee Khon Coy (1979), ilmuwan Singapura, pada tahun 1430, Cheng Ho telah membangun basis yang solid untuk menyebarkan Islam dan telah membangun komunitas orang-orang Tionghoa yang beragama Islam di Tuban, Cirebon, Gresik wilayah Jawa, dan Palembang di luar Jawa. Ilmuwan lainnya, Chen Yu Song, mengatakan bahwa pada periode ini, sebagian besar imigran dari Tiongkok telah memeluk Islam dengan dukungan dari Cheng Ho. Ia juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal.

Islam yang dibawa oleh komunitas Cheng Ho kemungkinan besar telah mengalami asimilasi sempurna dengan Islam yang dianut masyarakat lokal. Di Palembang, penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peran komunitas bangsa Tionghoa. Arya Damar yang diceritakan sebagai penguasa Palembang, pada sekitar tahun 1434 M dan juga sebagai ayah angkat dari Raden Patah disebut Parlindungan (1964) bernama Swan Liong. Ia merupakan utusan dari Gan Eng Tju, pemimpin komunitas China di Asia Tenggara sepeninggal Cheng Ho, untuk memimpin wilayah Kukang (Palembang). (Hok Tjwan Sie, 1990) Meski ada versi lain yang mengatakan bahwa Arya Damar adalah perwakilan majapahit di bawah Raja Brawijaya V

Raden Patah sendiri memiliki nama Djin Bun (Orang Kuat). Raden Patah disebutkan sebagai anak dari Raja Brawijaya V dengan seorang putri keturunan Champa, beberapa menyebutkan sebagai keturunan China. Komunitas Tionghoa Muslim di Palembang telah melebur secara sempurna dengan penduduk lokal, baik secara structural maupun kultural melalui pernikahan. Salah satu indikasi meleburnya, komunitas Muslim ini kemudian banyak meninggalkan ke-Tionghoaan baik dari segi cara berpakaian maupun dalam penggunaan bahasa. Artinya keberadaan orang-orang dari etnis Tionghoa yang beragama Islam sudah sejak lama berdampingan dan membaur secara sempurna dengan penduduk pribumi.

Kedua, generasi kedua Tionghoa Muslim, yaitu generasi MuslimTionghoa yang datang selanjutnya yang telah menikahi penduduk non Tionghoa. Datangnya generasi kedua Tionghoa Muslim diperkirakan terjadi bersamaan dengan migrasi besar-besaran warga Tiongkok akibat keruntuhan dinasti Ming pada tahun 1644 M. Adapun sebab-sebab terjadinya migrasi ini adalah, Pertama, sebagian besar masyarakat Tiongkok bagian selatan tidak mau mengakui pemerintah dinasti Qing dari bangsa Manchuria yang menguasai Tiongkok menggantikan pemerintahan Dinasti Ming. Kedua, sering terjadinya kerusuhan akibat pemberontakan terutama saat akhir pemerintahan dinasti

Ming dan awal Dinasti Qing, Ketiga, factor bencana alam seperti kelaparan di awal abad ke 17 dan yang paling terkenal adalah gempa bumi Shaanxi pada tahun 1556 yang memakan korban hingga 830.000 orang sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi yang sangat besar.

Migrasi orang-orang Tiongoa di Nusantara berasal dari berbagai sukubangsa, begitu juga yang adadi Palembang. Beberapa suku bangsa tersebut antara lain berasal dari propinsi Kwantung Fukien, dan Kanton. Orang Tiongoa yang berasal dari propinsi Kwantung adala suku bangsa Teochiu dan Hakka yang tinggal di daerah pantai selatan Cina dan daerah pedalaman Swatow bagian timur. Sedangkan yang berasal dari propinsi Fukien adalah suku bangsa Hokkien, dan yang berasal dari propinsi Kanton adalah suku bangsa Kwong Fu yang tinggal di daerah sebelah barat dan selatan dari propinsi Kwantung. (Vasanti, 2002)

Gelombang migrasi orang-orang Tionghoa ke Nusantara tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari situasi dan perkembangan politik yang terjadi di negeri asal mereka. Hal ini dapat dilihat dari catatan sejarah Dinasti Ming buku 324 dikutip dari Hanafiah (1995:102): Yin Yai Shei Lan mencatat tentang suasana di Palembang

“Kapal-kapal dari semua penjuru datang kemari pertama mereka akan mencapai muara air tawar kemudian memasuki P’egchia Selat Bangka. Mereka menambatkan kapal-kapal mereka ke pantai, di mana sangat banyak tiang-tiang bata di pantai; kemudian mereka mempergunakan kapal-kapal kecil untuk memasuki muara, kemudian mereka mencapai ibukota. Banyak dari penduduk negeri ini adalah orang-orang dari propinsi Kwantung dan dari Chang Chou dan Chuan Chou yang melarikan diri dan sekarang tinggal di negeri itu”

Para migran yang berasal dari propinsi Fukien bagian selatan adalah suku bangsa Hokkien di mana separuh lebih dari mereka berprofesi sebagai pedagang, selebihnya berprofesi sebagai petani dan nelayan tergantung di mana mereka tinggal. Sedangkan yang berasal dari propinsi Kwantung yaitu orang Hakka sebagian bekerja sebagai pengusaha industry kecil dan sebagian lainnya bekerja di pertambangan. Orang-orang Teochiu kebanyakan bekerja sebagai petani atau bekerja sebagai kuli-kuli perkebunan. Orang-rang ini di Palembang dikenal dengan sebutan Cina Kebon, karena pekerjaan yang ditekuninya. Mereka ini pada masa colonial memang didatangkan sebagai petani di berbagai perkebunan di Sumatera Timur. (Vasanti, 2002: 360) Sedangkan orang-orang Kwong Fu di pulau Jawa kebanyakan bekerja sebagai pengusaha, pemilik industry kecil dan berdagang. Namun, di Bangka mereka bekerja sebagai pekerja di tambang-tambangtimah, sementara di Palembang mereka menjadi buruh industry kecil.

Pada mulanya kelompok migran dari Tiongkok hanya terdiri dari laki-laki saja, baru pada abad ke 19 para perempuan ikut bermigrasi. Awalnya para imigran laki-laki berharap bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman dan dikubur di sana dengan membawa kesuksesan dari daerah

perantauan. Pemahaman seperti ini dipengaruhi oleh kepercayaan Xiao dan Zhong. Xiao berarti berbakti kepada leluhur. Konsep ini diwujudkan dengan merawat kuburan orang tua dan papan namanya terutama bagi kaum laki-laki. Sementara Zhong berarti berbakti kepada negaranya. Namun disebabkan karena prahara politik dan kesulitan akses banyak dari mereka memilih untuk menetap di perantauan dan tidak kembali ke kampung halamannya.

Komunitas Muslim-Tionghoa generasi kedua di Palembang dapat diketemukan pada (1) kelompok Muslim-Tionghoa migran yang memang telah memeluk Islam dari negeri Tiongkok. (2) kelompok migran Tiongkok yang konversi ke dalam agama Islam setelah menetap di Palembang. Konversi agama para migran Tiongkok pada abad 17 dan 18 itu kebanyakan disebabkan oleh faktor pernikahan. Mereka disyaratkan untuk mengkonversi agamanya menjadi Islam dan bersunat jika ingin menikahi penduduk local. Kebanyakan kelompok dengan kategori kedua ini telah berasimilasi secara sempurna dengan mengganti namanya dengan nama Islam. (3) Para perempuan hasil dari pernikahan laki-laki migran Tiongkok dengan penduduk local. Untuk kategorisasi yang ketiga itu dianggap tidak merepresentasikan identitas Tionghoa. Hal itu disebabkan karena masyarakat Tionghoa menganut system kekerabatan Patrilineal maka tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk meneruskan tradisi leluhurnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum abad 19, hanya laki-laki saja yang bermigrasi ke Nusantara. Sebelum abad 19 mereka yang memiliki anak perempuan hasil dari perkawinan dengan penduduk local banyak diserahkan kepada penduduk asli. Bahkan hingga kini praktik tersebut kadangkala masih terjadi. Hal itu disebabkan oleh pola kekerabatan Patrilineal, di mana status perempuan tidak memegang peranan penting dalam menjaga tradisi keluarganya. (Mary Sommers Heidhues dikutip dari Abdullah Idi: 2011:72).

Untuk kategori pertama Palembang dapat dilihat dari kisah keturunan tiga saudagar Tiongkok yang menjadi Mitra dari Kesultanan Palembang. Salah satu saudagar tersebut bernama Saudagar Ko Cing, sehingga diabadikan menjadi nama sungai saudagar Ko Cing yang terletak di 3-4 Ulu Palembang. Diceritakan:

“Ada tiga pangeran yang berasal dari Tiongkok yang datang ke Palembang, yang beragama Islam, pada saat di Tiongkok berkuasa Dinasti Ming yang mayoritas pemimpinnya beragama Islam. Lalu, saat terjadi pemberontakan yang menjatuhkan Dinasti Ming, ketiga pangeran itu lari ke Palembang. Tiga pangeran atau saudagar itu bernama Kapiten Bela, Kapiten Asing dan Kapiten Bungsu. Kapiten Bungsu meninggal dunia di pulau Kemaro, sebuah delta di sungai Musi, sedangkan Kapiten Bela dan Kapiten Asing menikah dengan perempuan melayu Palembang. Mereka mempunyai anak, cucu, dan keturunan sampai pada keturunan mereka yang bernama Yhu Cing. Lantaran Yhu Cing kaya raya, dia pun dipanggil saudagar Yhu Cing. Lantaran rumahnya di dekat sebuah anak sungai yang dijadikan dermaga, maka sungai itu pun disebut sungai Saudagar Yhu Cing dan selanjutnya berubah—lantaran lapas Melayu—menjadi Kocing. Saudagar Yhu Cing ini kemudian memiliki anak bernama Jaya

Laksana, yang merupakan tokoh penting dalam pembangunan masjid Agung Palembang di masa Sultan Mahmud Badaruddin I” pada tahun 1724. Jaya laksana meninggal pada tahun 1735. (Berita Musi, 1 Agustus 2011)

Tiga pangeran dari Tiongkok diceritakan bernama, Kapiten Bela, Kapiten A sing dan Kapiten Bungsu. Ketiga Kapiten tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Kapiten Bela merupakan Tiku atau pembantu Susuhan Palembang. Saudagar Yhu Cing sendiri merupakan anak dari Kapiten Bela yang memperistri gadis melayu dari lingkungan kesultanan Palembang. Saudagar Yhu Cing kemudian memperistri misannya yang memiliki gelar Nona Besar binti Kapitan A Sing Minal Muslimin (seorang Tiku/Toke Susuhan Palembang Darussalam). Baba Yhu Cin bergelar Pengeran Saudagar Ku Tjing kemudian menjabat sebagai Tiku atau Teuku (setingkat menteri) Susuhunan Palembang. Dari pernikahannya dengan Nona Besar lahirlah seorang putra bernama Baba Muhammad Najib. (Oedjang Omar, Silsilah Keluarga Datuk Nan Lenggok)

Baba Muhammad Najib kemudian menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin. Baba Muhammad Najib bergelar Ki Demang Jayosepuh Wiroguno, salah seorang cucunya bernama Nyayu Betet, isteri Sunan Lemabang, cucunya yang lain Nona Rohaya Nyai Pengeran Noto Dinato. Baba Muhammad Najib mempunyai seorang putera bernama Baba Abdul Khalik.

Baba Abdul Khalik adalah menjabat sebagai Tiku pada masa kesultanan Mahmud Badaruddin. Ia bergelar Ki Demang Wirolaksano, saudaranya yang lain Baba Abdul Jalil Ki Ranggo Laksano Jaya. Sementara saudara perempuannya bernama Nyai Ranggo Slu yang diperisteri Ki Ranggo Wirosentiko Sungai Goren. (Oedjang Omar, Silsilah Keluarga Datuk Nan Lenggok)

Baba Abdul Khalik, memiliki seorang putra yang dinamai seperti ayahnya Baba Muhammad Najib. Ia menduduki jabatan sebagai pegawai Kesultanan pada masa Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Rata yang bekerja sama dengan pihak omande Van Den Gouverneur General ad interim Van Nederlandsc East Indie. Ia bergelar Ki Demang Jayalaksana. Pada tahun 1848 bersama iparya Kiyai Kemas Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah (Syekh Muhammad Alfalimbany), mereka menyelenggarakan kegiatan cetak mencetak kitab agama Islam dan mencetak Al Qur'an dengan khot Syekh Muhammad Al Falimbany. Cetakan itu kemudian diperbanyak oleh Kiagus Muhammad Arief bin Demang Wiroturuno Muhammad Zen dibawah pengawasan Ibrahim bin Husein Sohib Naguer dari Singapura, murid tuan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi Malaka. Demang Jayalaksono Muhammad Najib bin Almarhum Demang Wirolalcsono Abdul Khalik meninggal pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1268 H hari ahad pukul 4 lewat 15 menit pada sore hari

beliau wafat dalam usia 45 tahun. Ia meninggalkan putra bernama Baba Haji Balkiya dan Baba Mas'ud / Baba Su'ud. (Oedjang Omar, Silsilah Keluarga Datuk Nan Lenggok)

Baba Haji Balkiya berangkat haji dengan kapal layar bersama isterinya bernama Nyimas Nalifah binti Kemas Haji Muhammad Tohir tinggal di 4 Ulu Laut Sungai Semajid (sekarang menjadi Lorong Firma H. Akil). Sementara Baba Su'ud / Baba Mas'ud ikut ambil bagian dalam melawan Belanda dan berhasil menenggelamkan kapal pesiar Belanda di Muara Sungai Ogan Palembang, isterinya R.A. Hana binti Raden Ranggo Astro Manggala. Anak Baba Haji Balkiya bernama Baba Amin Azhari yang merupakan seorang ulama besar Palembang. Ia meninggal pada tahun 2002. (Oedjang Omar, Silsilah Keluarga Datuk Nan Lenggok)

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya kelompok Muslim-Tionghoa yang berasal dari generasi kedua akibat migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Nusantara pada awal abad ke-17 masih ada hingga sekarang. Meski jumlahnya sedikit namun pada masa Kesultanan Palembang Darussalam mereka diberikan kedudukan yang istimewa karena status agamanya. Keistimewaan status yang didapatkan antara lain: (1) diangkat sebagai pejabat pada masa Kesultanan, (2) berhak untuk menikahi keturunan bangsawan (3) diberikan tempat di daratan, karena status tanah adalah milik Sultan. Pada masa kesultanan suku Tionghoa diizinkan tinggal di Palembang dengan mendirikan rumah-rumah terapung di tepi Sungai atau "Wangkang Cina", karena statusnya yang dianggap sebagai orang Asing.

Menariknya meski mereka telah benar-benar berasimilasi baik secara structural (diangkat sebagai pejabat di lingkungan Kesultanan) maupun kultural diwujudkan dengan peran mereka dalam mengembangkan ajaran Islam, namun identitas Tionghoa masih dipertahankan. Seperti halnya gelar Baba dan Nona yang masih disematkan sebagai panggilan bagi mereka. Selain itu, beberapa masih mencantumkan nama marganya seperti warga Negara keturunan Tionghoa lainnya. Contoh dicantumkan nama Tionghoa dapat dilihat pada adpertensi kematian. Baba Amin Azhari misalnya dalam adpertensinya dicantumkan nama Tionghoanya yaitu Cek Ming. Adpertensi kematian adalah khas terjadi pada masyarakat Tionghoa. Tujuannya tidak lain agar banyak yang datang dan mendoakan jenazah. Mengenai KH Muhammad Amin Azhari, ia dikenal sebagai ulama yang tegas dalam berdakwah, misalnya dalam bidang pendidikan, pengajaran dan dakwah. Di bidang pendidikan, KH Muhammad Amin Azhari mengajarkan ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, hadits dan bahasa Arab di rumah-rumah, langgar ataupun masjid. Dia juga seorang juru dakwah yang sangat tekun dan aktif. Dia sangat gigih dalam berdakwah dari kampung ke luar kampung sehingga di setiap pelosok Kota Palembang. Masyarakat mengenalnya dengan nama Kyai Cek Ming atau Baba Cek Ming. Dia ulama yang berpendirian tegas dan dia tidak segan-segan menegur orang, jika dilihatnya

ada orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya, sehingga membuat orang yang ditegur itu menjadi kaget, tetapi mereka mengucapkan terima kasih kepadanya, karena berkat tegurannya membuat mereka kembali ke ajaran agama. Ia ialah ulama yang konsisten dengan apa yang diyakininya. Dia memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang ilmu falak . Ia pernah menetapkan Hari Raya Idul Fitri yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pada tahun 1995. Ketika pemerintah memutuskan 1 syawal pada keesokan harinya, dia menyuruh masyarakat membatalkan puasa pada siang hari, karena menurut perhitungan ilmu falak yang dia lakukan pada saat itu, telah masuk tanggal 1 Syawal, dan merupakan hasil Tasyri' yang dilakukannya. (Waluyo dan Asyari, 2015: 91)

KH Muhammad Amin Azhari mula-mula dirumahnya sendiri. kemudian, ia mulai diminta memberikan pelajaran di rumah penduduk, mushall-mushalla, masjid di Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Kelurahan 8 Ilir Kenten. Keulamaannya mulai mendapatkan pengakuan masjid ketika ia mulai mengajar di Masjid Agung Palembang. KH Muhammad Amin Azhari mendapatkan jadwal mengajar ba'da zhuhur. Pada bulan Ramadhan, aktivitasnya di masjid tersebut menjadi lebih padat. Pada hari biasa, dia mengajar seminggu sekali, sedangkan pada bulan Ramadhan ia mengajar sebanyak dua kali seminggu. Selain itu, juga menjadi pengurus kursus cepat falaqiah di Palembang tahun 1951 dan pengurus Masjid Agung Palembang dari tahun 1954. Ia juga dikenal juga sebagai seorang Mursyid dari Tarekat Samaniyah. Menurut keterangan Kms. H. Andi Syarifuddin, dalam mengajar tasawuf KH Muhammad Amin Azhari, sering mengajarkan zikir atau ratib Samman kepada para jama'ahnya. Ia mengajarkan kitab-kitab karangan Syech Abdul Samad al-Palimbani dan kitab juga kitab karangan gurunya Syech Abdullah Azhari (Kyai Pedatuan). (Waluyo dan Asyari, 2015:92)

Sebagai ahli ilmu falak KH. Muhammad Amin Azhari menulis beberapa karya di antaranya "Ridalah Puasa Umum dan Khusus" dan "Tanhibul Umum 'ala Dawa'i al-Masnum". Pada risalah umum dan khusus ini, ulama ini mengutip dari beberapa buku-buku dan fatwa-fatwa ulama termasyhur seperti Ibnu Abi Dam, Ibnu Hajar, Syekh Salim bin Umar al-Hudry, al-Habib Abdurrahman al-Mansyur, Ibnu Ziyad, Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafiqih, Abu Bakhromah, Imam Nawa, al-Alamah Tohirina Hasyim, Habib Usman bin Abdullah bin Yahya al-Betawi. (Waluyo dan Asyari, 2015:95)

KH Muhammad Amin Azhari juga pernah menjabat sebagai hakim agama pada tahun 1957, dan diangkat menjadi hakim honorarium atau hakim luar biasa (berdasarkan SK dari Menteri Agama) pada Pengadilan Agama Palembang pada 10 Januari 1957 dengan Nomor: B/VI/d-1/132/1957. Sebagai hakim, selain menjadi hakim pada masalah perceraian dan perkawinan, ia juga pernah mengadili Syiah karena dianggap sebagai ajaran yang dianggap menyimpang Islam . Putusan itu menuntut agar Tokoh Syiah menghentikan dakwahnya dan menuntut pemerintah agar

dikeluarkan dari Palembang. KH Muhammad Amin Azhari mengundurkan diri dari jabatan sebagai hakim luar biasa pada tahun 1973, dan menolak diangkat sebagai kepala Pengadilan Agama di Tanjung Pandan, Pulau Belitung, dengan alasan menjadi pegawai negeri dapat menjauhkan dirinya dari umatnya di Palembang. (Waluyo dan Asyari, 2015:98)

KH Muhammad Amin Azhari bersama ahli waris lain dengan ikhlas mewakafkan tanah warisan dari Demang Jayo Laksano leluhurnya yang merupakan pejabat semasa Kesultanan Palembang Darussalam) untuk dijadikan jalan raya. Jalan itu kemudian dinamakan Jalan KH Muhammad Asyiq, yang merupakan gurunya sendiri untuk mengenang jasa-jasa gurunya tersebut yang telah mendidiknya hingga menjadi seorang ulama besar di Palembang. Di samping peran-peran di atas, KH Muhammad Amin Azhari juga mendirikan yayasan yang berorientasikan bidang pendidikan agama yang hingga kini masih eksis hingga saat ini dan dikelola oleh keluarganya. Yayasan tersebut bernama Najahiyah dan berlokasi di Jalan K.H Muhammad Asyiq. (Waluyo dan Asyari, 2015:92)

KH Muhammad Amin Azhari mulai bergabung dengan organisasi Nahdatul Ulama (NU) sejak tahun 1934 yang merupakan awal berdirinya NU di Palembang. Organisasi NU sendiri lahir di Jombang pada tahun 1926. Ia sendiri merupakan murid dari KH Abdullah Azhary yang menjadi perintis berdirinya NU Cabang Palembang. Pada saat itu dia berkedudukan sebagai anggota.

Peranan KH Muhammad Amin Azhari dalam keorganisasian Nahdatul Ulama wilayah Sumatera Selatan sangat penting, dia sangat konsisten dalam memperjuangkan paham ahlussunnah wal jama'ah di Palembang dan motor penggerak gerakan NU. Sejak tahun 1950, KH Muhammad Amin Azhari mulai mengikuti muktamar yang diadakan oleh Nahdatul Ulama setiap 5 tahun sekali, sampai dengan tahun 1989 yang dilangsungkan di Jogjakarta. Tahun 1952, dia menjabat sebagai pengurus suriah Partai NU Sumatera Selatan. Penting untuk dicatat bahwasanya tahun 1952, merupakan tonggak sejarah yang penting bagi gerakan NU di Indonesia. Pada muktamar yang dilangsungkan NU di Palembang, NU mengeluarkan resolusinya untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi partai tersendiri untuk ikut dalam berkompetisi pada pemilu tahun 1955. Ia bersama KH Muhammad Yusuf Umar dan anggota yang lain, juga berperan aktif dalam berkampanye ke daerah-daerah untuk memenangkan Partai Nahdatul Ulama pada pemilu yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. (Waluyo dan Asyari, 2015:99)

Dalam tradisi di Nahdatul Ulama, setiap Kyai yang dianggap banyak berjasa bagi perkembangan NU, tidak boleh keluar dari kepengurusan NU meskipun usianya sudah uzur, sehingga ia tetap ditempatkan sebagai mustasyar. Pada periode 1994-1998 dan periode 1999, KH

Muhammad Amin Azhari menjabat sebagai Mustasyar yaitu dewan pertimbangan (penasehat) Pengurus Wilayah NU (PWNU) Sumatera Selatan hingga wafat. Sebagai mustasyar, ia berwenang memberikan saran, baik diminta ataupun tidak tentang bagaimana melaksanakan program NU yang sudah direncanakan.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya identitas Tionghoa masih melekat pada kelompok Tionghoa Muslim generasi kedua yang tiba di Palembang pada abad ke 17 M. Meskipun mereka sudah berintegrasi secara total dengan masyarakat local terutama Melayu Palembang, namun di beberapa sisi masih mempertahankan identitasnya. Pertama dapat diketahui dari penulisan biografi leluhur keluarga mereka. Dari situ didapatkan pengertian adanya maksud untuk mempertahankan identitas ketionghoannya. Penulis memang tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran tentang ketiga leluhur mereka yang berkedudukan sebagai Pangeran Tionghoa baik nama lengkap Tionghoanya maupun kedudukannya sebagai Pangeran Dinasti Ming. Namun gelar pangeran yang dipakainya lebih menunjukkan legitimasi yang dimilikinya sebagai imigran terhormat dari Tiongkok yang bukan disertir perang atau bukan juga seorang criminal sehingga layak untuk masuk di lingkungan keraton Palembang. Terbukti bahwasanya keturunan mereka dapat menduduki posisi penting dalam pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Perlu juga dipahami bahwasanya agama memiliki ikatan kuat dalam rangka mengintegrasikan antara keturunan Tionghoa dengan Pihak Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka yang belum beragama Islam mendapat perilaku berbeda dengan yang beragama Islam seperti tidak diperbolehkannya tinggal di daratan. Beberapa sumber membuktikan bahwasanya Tionghoa Muslim mendapatkan kepercayaan dari sultan Palembang sebagai perantara dagang, contohnya Sultan Mahmud Badaruddin I pernah menunjuk Tionghoa Muslim bernama Bung Huyut (Bong Hu But) untuk mendatangkan kuli timah dari Tiongkok Selatan.

Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya beberapa tokoh dari kelompok itu memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan Islam di Palembang. Seperti dapat dilihat dari biografi KH. Amin Azhari. Ia merupakan seorang ulama besar di Palembang, dan menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam. Ia adalah salah satu garda dari kelompok Islam tradisional, berperan aktif dalam menjaga ajaran Ahlul sunnah wal Jamaah sekaligus penggerak organisasi NU dari awal berdirinya hingga ia meninggal. Meskipun ia seorang ulama besar di Palembang, identitas Tionghoanya masih dipertahankan. Panggilan baba masih tersemat di depan nama panggilannya. Tidak hanya itu bahkan ia dipanggil dengan nama Baba Cek Ming. Pemakaian nama Ming semakin mempertegas bahwasanya ia adalah keturunan Tionghoa, terlepas apakah nama itu merujuk sebagai

nama tionghoanya ataukah menunjukkan bahwa ia masih memiliki hubungan dengan Dinasti Ming. Dari situ menunjukkan bahwasanya keTionghoan merupakan hal yang wajar dalam masyarakat Muslim Melayu Palembang. Oleh sebab itu keberadaan mereka di Palembang semakin menunjukkan bahwasanya tidak ada persoalan yang signifikan bagi komunitas Tionghoa Muslim di Palembang.

Ketiga, adalah orang-orang dari suku Tionghoa yang lahir Non Islam kemudian konversi menjadi Islam. Para muallaf Tionghoa itu kemudian mendirikan organisasi bernama PITI. Hingga saat ini, PITI masih berperan sebagai wadah bagi orang-orang Tionghoa yang telah konversi ke dalam agama Islam.

Tanpa disadari PITI sebenarnya memiliki peran penting dalam menumbuhkan identitas Muslim-Tionghoa di Indonesia. Muslim-Tionghoa sebagai identitas tersendiri kemungkinan baru muncul semenjak era pergerakan Nasional pada tahun 1930'an seiring dengan tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan berdasar identitas di Indonesia. Identitas Muslim-Tiongho ditumbuhkan dengan dibentuknya organisasi PIT (Persatoean Islam Tionghoa) di Medan dan PMT (Persatoean Moeslim Tionghoa) di Bengkulu. Kedua organisasi itu kemudian melebur membentuk PITI (Persatoean Islam Tionghoa Indonesia) yang terbentuk pada tahun 1952. PITI sama seperti dua organisasi pendahulunya merupakan wadah bagi orang-orang Tionghoa yang konversi dalam agama Islam. PITI awal didirikannya memang diperuntukkan bagi para orang-orang tionghoa yang konversi menjadi Islam. Mereka menjadikan PITI sebagai tempat bernaung, karena menjadi muslim, mereka harus menghadapi kenyataan akan sulitnya keberterimaan keluarga atas status barunya tersebut. Stereotype yang menyejarah menjadi gap antara identitas Muslim dan Tionghoa. Oleh sebab itu Islam tidak populer di kalangan Tionghoa, di samping kenyataan bahwa komunitas Islam-Tionghoa tergolong kecil di bandingkan dengan komunitas Tionghoa yang menganut Buddha, Kristen dan Konfusianisme. Konteks identitas itu dimunculkan kembali, bisa jadi karena identifikasi yang menyejarah bahwa identitas antara Tionghoa berbeda dengan identitas Muslim, namun pada kenyataannya mereka hidup di antara keduanya.

PITI secara nasional diresmikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. Organisasi itu merupakan merger dua organisasi Islam Tionghoa bernama PIT (Persatoean Islam Tionghoa) yang berbasis di Medan dan PMT (Persatoean Moeslim Tionghoa) yang berbasis di Bengkulu. H.Abdul Karim Oei Tjeng Hien, H. Abdussomad Yap A Siong, dan Kho Goan Tjin adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya PITI.

Pada masa pemerintahan Suharto, PITI seolah dijadikan instrument Negara dalam melakukan fungsi asimilasi komunitas Tionghoa terhadap pribumi. Keberadaan PITI tentu didukung oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan struktur organisasi yang mengikuti birokrasi dari tingkat pusat

dan menyebar ke beberapa daerah. Selama Orde Baru organisasi PITI berkembang hingga memiliki 20 cabang regional. PITI selama Orde Baru adalah satu-satunya organisasi yang mewadahi Muslim-Tionghoa. Setelah dikeluarkannya aturan mengenai pelarangan atribut yang berbau Tionghoa, pada 15 April 1971 kepanjangan PITI diubah dengan menghilangkan Tionghoa. Akronim PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

Dari latar belakang PITI tersebut tampaknya selaras dengan pandangan dari Jacobsen (2005: 71-87) mengenai dilemma Tionghoa Muslim Pertama, muncul sangkaan di kalangan komunitas Tionghoa bahwa Tionghoa Muslim dianggap menodai komunitas mereka, karena telah mengkhianati budaya dan identitas keTionghoa-annya sekaligus mendegradasi posisi mereka setara dengan Pribumi. Alasan terakhir tersebut dilihat dari konstruksi identitas Tionghoa yang menyejarah semenjak kolonialisme. Mereka merupakan kelas sosial ke-dua setelah bangsa eropa yang berperan sebagai perantara antara pihak colonial dengan pribumi. Dalam hal ini Belanda memang sengaja melakukan politik rasial dengan memisahkan antara kelompok ras kulit putih, timur-asing, dan pribumi. Kedua, di sisi lain, Tionghoa Muslim masih belum dapat membaur dengan pribumi. Masih berkembangnya kecurigaan dan stereotype dari pribumi terhadap orang-orang Tionghoa masih menjadi masalah yang berarti. Oleh sebab itu, Tionghoa Muslim dipandang oleh Jacobsen terjebak di tanah tak bertuan di antara pribumi dan komunitas tionghoa lainnya.

Nampaknya pandangan Jacobsen ini tidak didasarkan perubahan sosial-politik semenjak runtuhnya Orde Baru yang sangat berpengaruh besar bagi kehidupan Tionghoa Muslim di Indonesia. Setelah Reformasi, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapuskan peraturan-peraturan yang diskriminatif pada masa Orde Baru terhadap komunitas Tionghoa. Semenjak saat itu tiga pilar komunitas tionghoa mulai dimunculkan yaitu Pers, sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi berbasis Tionghoa. Komunitas Tionghoa mulai mempertunjukkan seni Barongsai kepada masyarakat umum, melakukan perayaan Cap Go Meh, dan sebagainya. Abdurrahman Wahid bahkan mengakui agama Kong Hu Cu sebagai agama resmi ke-6 yang diakui eksistensinya di Indonesia. Setelah itu, Presiden ke 5 RI Megawati membuat hari Imlek sebagai hari libur nasional.

Euforia kebebasan dalam mengekspresikan ke-Tionghaan juga terjadi di antara Tionghoa Muslim. Setelah masa Reformasi, PITI menunjukkan geliatnya. Pada tahun 2005, Musyawarah ke III PITI memutuskan menggunakan kepanjangan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di samping nama Pembina Iman Tauhid Indonesia, di mana nama terakhir adalah nama yang dibentuk semasa Orde Baru sebagai instrument Negara dalam proses asimilasi bagi kelompok Tionghoa. Nampaknya, pandangan Jacobsen di atas kurang tepat kiranya jika diterapkan dengan kiprah Tionghoa Muslim

pada masa reformasi. Dalam hubungannya dengan komunitas Tionghoa lainnya, para Tionghoa Muslim berusaha untuk menunjukkan ke Tionghoa-an nya, seperti munculnya Masjid Cheng Ho yang khas dengan ornamen Tionghoa di Surabaya pada tahun 2002 dan diikuti oleh kota-kota yang lainnya, mempertunjukkan tarian Barongsai setiap peringatan hari besar Islam, dan merayakan Cap Go Meh. Mereka menjalin kerjasama dan komunikasi dengan komunitas-komunitas Tionghoa lainnya dalam acara-acara tersebut. Dalam hal ini, PITI berperan besar untuk upaya rekonsiliasi antara komunitas Tionghoa dengan umat Islam secara umum di Indonesia pasca kerusuhan 1998. Di sisi sebaliknya, kepada Umat Islam Indonesia lainnya, Muslim-Tionghoa berjalan sangat lancar dalam membangun interaksi. Nyaris tidak ada stigmatisasi antara umat Islam secara keseluruhan dengan Muslim-Tionghoa. Bahkan di antara Tionghoa Muslim hadir sebagai tokoh-tokoh Islam yang terkemuka, seperti Syafi'I Antonio, Anton Medan, Koko Liem, Tian Mei Hwa dan lain-lain. Tiga nama terakhir bahkan menggunakan identitas ke-Tionghoan sebagai “merk” dari dakwah yang mereka lakukan. (Hew Wai Weng 2010)

Dari pemaparan di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa kehadiran PITI memiliki peranan penting bagi Tionghoa Muslim yaitu (1) awal kehadiran PITI sebagai tempat bernaung bagi orang-orang Tionghoa yang berkonversi ke dalam agama Islam, mengingat sulitnya tingkat keberterimaan keluarga dan lingkungan atas status barunya. (2) PITI sebagai lembaga dalam memperkuat pemahaman keislaman bagi para muallaf dari kelompok Tionghoa dan ikut aktif dalam mensyiarkan Islam kepada non Muslim terutama kepada kelompok yang sama. (3) PITI sebagai instrument dalam proses asimilasi bagi masyarakat Tionghoa dengan memeluk Islam. (4) Setelah berakhirnya rezim orde baru, PITI berperan serta dalam memediasi interaksi antara orang-orang Tionghoa dengan umat muslim lainnya, terutama pasca kerusuhan 1998. Hal itu dilakukan dengan mempromosikan Islam yang bernuansa ke-Tionghoan kepada umat Muslim lainnya, dan mendapat respon positif dari umat Islam lainnya. (5) PITI tampil sebagai kekuatan civil society pada masa reformasi yaitu turut ambil bagian dalam mengembangkan multikulturalisme dalam wadah NKRI.

Pada tahun 1970, organisasi PITI di Palembang dipelopori oleh tiga orang tokoh Islam Tionghoa antara lain H. Abdul Halim (Lim Kia Yu), Ali Sadiqin dan Dr Lee Kye Ting. Pada masa awal berdirinya H. Abdul Halim ditunjuk sebagai ketuanya. Awal berdirinya PITI di Palembang mendapat dukungan dari manteri Agama, Menteri Pendidikan dan Manteri Kebudayaan serta PITI pusat yang ada di Jakarta turut berpartisipasi dalam pendirian PITI di kota Palembang. Tujuan awal didirikannya PITI Palembang seperti halnya PITI secara nasional adalah untuk membina keluarga Tionghoa yang baru memeluk agama Islam, menyebarkan Islam pada masyarakat Tionghoa non

Islam dan pada masyarakat (Palembang), serta melaksanakan syiar Islam dalam arti luas. (Wawancara ketua PITI Palembang H. Ahmad Afandi (Didi), 7 Maret 2017)

Pada awalnya PITI banyak berfokus di bidang dakwah. Dakwah banyak dilakukan dengan mengadakan pengajian di rumah kediaman H. Abdul Halim. Beliau selalu berdakwah dengan menggunakan pendekatan etnis, salah satunya dengan menggunakan bahasa Mandarin. Ia juga tidak segan-segan untuk memberikan pengajian dari rumah ke rumah warga. Pendekatan yang dilakukannya cukup membuat banyak masyarakat Tionghoa menjadi tertarik untuk mempelajari Islam.

Cara itu masih digunakan oleh tokoh-tokoh PITI sekarang. Beberapa tokoh PITI mengaku bahwa cara seperti itu dianggap efektif dan lebih mudah untuk mengajak orang-orang Tionghoa untuk beralih ke agama Islam sekaligus mengajak mereka untuk berbaur dengan pribumi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya antusias warga untuk mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh PITI baik dari mereka yang berasal dari masyarakat Tionghoa non Islam juga masyarakat sekitar. Meski begitu dapat dijadikan catatan bahwasanya masyarakat Tionghoa terutama setelah reformasi dalam kehidupan sehari-harinya banyak melakukan pembauran dengan masyarakat Islam Palembang. Mereka tidak segan-segan datang ketika diundang pengajian oleh orang-orang Islam ketika hari-hari besar Islam di tingkat RT atau RW. Begitu juga sebaliknya, beberapa orang Tionghoa non Muslim yang tinggal di lingkungan muslim bahkan ketika memiliki hajatan mengundang ustadz untuk memberikan tausiah kepada undangan yang hadir.

Pada kepemimpinan H. Abdul Halim organisasi belum terorganisir dengan baik seperti tidak adanya mekanisme pergantian kepemimpinan, tidak ada struktur organisasi serta belum mempunyai AD/ART yang jelas. Perkembangan dakwah PITI pada masa H. Abdul Halim tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya, karena tidak ada pendaftaran bagi anggota yang masuk, sehingga informasi mengenai PITI pada masa H. Abdul Halim hampir tidak ada.

Pada tahun 1980 sampai 2001, PITI sempat mengalami kevakuman secara organisatoris. Menurut penulis kevakuman ini terjadi oleh 2 faktor, yaitu: *Pertama*, karena adanya dualisme kepemimpinan, yaitu PITI H. Abdul Halim dan PITI Ali Sadiqin. Ali Sadiqin merupakan pengikut H. Abdul Halim tahun 1970, yang memisahkan diri dari PITI dan membentuk PITI baru yang diketuai oleh beliau. Kedua pimpinan ini masing-masing mengakui mempunyai kekuatan hukum. Keduanya bersekukuh namun secara pantas dan sehat. Dualisme kepemimpinan juga disebabkan karena perbedaan orientasi politik dari kedua tokoh tersebut. PITI pimpinan Ali Sadiqin ingin mengarahkan organisasi tersebut untuk dekat dengan partai politik pemerintah yaitu Orde Baru, sementara PITI pimpinan H Abdul Halim menginginkan PITI untuk bebas dari partai politik yang sebenarnya H.

Abdul Halim sendiri merupakan simpatisan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai yang mewadahi kelompok Islam. Adanya imbas dari dualism kepemimpinan itu berakibat pada tidak efektifnya organisasi hingga terjadi kevakuman dalam beraktifitas. Kedua, klemahnya pengkaderan. Pada saat itu tidak ada penggerak yang betul-betul mampu dalam menggiatkan organisasi atau dengan kata lain lemahnya sumber daya manusia yang mumpuni untuk menggerakkan organisasi. Melihat kondisi ini, pengikut kedua belah pihak telah berusaha melebur dua menjadi satu, tetapi sama sekali tidak mengalami perubahan, karena masing-masing menganggap mereka paling absah. Bahkan keduanya melakukan kegiatan seperti biasa namun bersifat eksklusif pada kelompok masing-masing. Karena kondisi demikian, banyak muallaf yang membutuhkan bimbingan dari PITI merasa tidak lagi diperhatikan. Bahkan dengan kondisi itu seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meminta dana dengan mengatasnamakan PITI membantu mu'allaf, namun pada kenyataannya dana tersebut diselewengkan, sehingga harga diri PITI jatuh dan kehilangan kepercayaan yang telah diperoleh selama ini".

Kejadian itu sangat memprihatinkan, sehingga beberapa anggota PITI merasa tidak nyaman dan akhirnya meninggalkan PITI. Melihat kondisi demikian maka baik H Abdul Halim maupun Ali Sidiqin dengan kesadaran diri meninggalkan jabatannya sebagai ketua karena dirasa roda organisasi tersebut berjalan tidak pada relnya. Keluarnya mereka dari PITI bukan berarti PITI menghentikan kegiatannya dalam menaungi para Muallaf dan melakukan kegiatan dakwah. Kegiatan mereka kemudian diwadahi oleh Yayasan Masjid Agung. Artinya kegiatan yang dilakukan PITI masih terus berjalan meskipun dalam kevakuman organisasi. Yayasan Masjid Agung merasa kegiatan PITI harus terus terlaksana, karena dosa hukumnya ketika membiarkan para Muallaf terombang-ambing dalam ketidak pastian dan tidak mendapatkan bimbingan yang berarti membiarkan mereka kembali kepada kekafirannya.

Yayasan masjid Agung yang diketuai Bunyamin, merespon keadaan tersebut, beliau berinisiatif untuk mendirikan organisasi otonom di bawah naungan yayasan masjid Agung yang diberi nama IPM MA (Ikatan Persaudaraan Muslim Masjid Agung). Organisasi itu diketuai oleh H. Muhammad Siddik yang pernah duduk sebagai anggota PITI. Semenjak adanya lembaga IPM MA (Ikatan Persaudaraan Muslim Masjid Agung), lembaga ini menjadi alternative bagi masyarakat Tionghoa Muslim untuk baik dalam berdakwah maupun dalam mendapatkan bimbingan keagamaan. Ketika gerak dakwah dari masyarakat Tionghoa Muslim kembali menggeliat, maka terdapat keinginan kembali untuk membentuk PITI yang baru. Pada saat itu pengurus IPM MA (Ikatan Persaudaraan Muslim Masjid Agung), H. Muhammad Siddik sempat mendapatkan undangan menghadiri muhtamar PITI pusat di Jakarta pada tahun 2001, setelah pulang dari Jakarta beliau

mengadakan Muskorwil (Musyawarah Pimpinan Wilayah) di Palembang guna membentuk PITI yang baru.

Namun sebelum itu, panitia Muskorwil melayangkan surat ke PITI pusat untuk mendemosioner kepengurusan PITI di Palembang yang sebelumnya (PITI H. Abdul Halim dan Ali Sadiqin) Akhirnya keluarlah surat demosiomer dan atas mandat dari DPP PITI pusat di Jakarta maka Muskorwil PITI Sumatera Selatan dapat dilaksanakan pada 20 Mei 2001. Pada Muskorwil tersebut, secara demokratis H. Muhammad Siddik menjadi ketua PITI. Setelah terpilihnya kepengurusan yang baru PITI menyelenggarakan secara seremonial acara pembentukan PITI baru pada tanggal 21 Juli 2001 yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad

Masa kepemimpinan H Muhammad Siddiq dimulai dengan pembenahan organisasi, tujuannya PITI adalah untuk membangun kembali eksistensi PITI yang pernah mengalami kevakuman. Saat itu mulai terbentuk bidang-bidang yang membawahi program kerjanya masing-masing misalnya: dalam bidang sosial, ekonomi, keagamaan dan pendidikan. Di antara bidang-bidang tersebut aktivitas PITI yang paling utama adalah pembinaan terhadap muallaf (dalam bidang keagamaan).

Dengan kepengurusan baru ini PITI dapat memberikan angin segar dikalangan jemaahnya dan berbagai program baru dirancang dan banyak kegiatan yang telah dilaksanakannya seperti: mengadakan pembinaan warga keturunan Cina/Tionghoa serta meng-islamkan warga keturunan Cina/Tionghoa. Selain itu, pada masa beliau mulai dibentuk struktur organisasi serta mempunyai AD/ART yang jelas.

Dibentuknya PITI “baru” di Sumatera Selatan menurut konteksnya mencerminkan tiga hal. Pertama, kehadiran PITI merupakan respon atas tragedy 1998 yang menimpa masyarakat Tionghoa. Dengan kehadiran PITI menunjukkan bahwasanya tidak semua Tionghoa adalah “kafir”, ada sebagian masyarakat Tionghoa yang memeluk agama Islam. Meskipun tragedy tersebut bukanlah konflik agama, namun sentiment keagamaan setidaknya muncul sebagai pemicu. Hal itu dibuktikan dengan munculnya atribut-atribut agama seperti membentangkan sajadah, menuliskannya dengan identitas muslim di depan toko-toko yang ada agar tidak terkena amuk, meskipun masih juga pengrusakan dan penjarahan tidak terelakan bahkan menimpa juga dengan toko-toko milik muslim. Kedua, untuk mewartakan masyarakat Tionghoa yang baru memeluk Islam agar jangan sampai setelah kejadian itu mereka memiliki persepsi yang negative terhadap Islam, oleh karenanya niat itu disambut dengan baik oleh IPM MA. Ketiga, memulihkan kepercayaan masyarakat Islam terhadap PITI yang mana pernah diisukan beberapa oknumnya menyelewengkan bantuan yang diberikan untuk para muallaf.

PITI mulai mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, sosialisasi dengan para ulama di masjid-masjid di kota Palembang. PITI mulai mengembangkan sayapnya dengan mengadakan berbagai program kerja yang telah dibentuk, selanjutnya pada tanggal 27 November 2004, Muskorwil ke-II dilaksanakan dan menetapkan H. Herryanto sebagai ketua umum PITI untuk mempertahankan sekaligus meneruskan keberhasilan PITI di bawah pimpinan sebelumnya. (Laporan Kegiatan DPW PITI 2008)

Pada masa kepemimpinan H Herryanto PITI memperkuat kembali kerjasama dengan IPM MA, ormas-ormas Islam lainnya, masjid-masjid dan para da'i yang ada di Palembang untuk melakukan syiar Islam dan menerapkan ajaran-ajarannya, terutama pada mereka yang baru mengenal dan memeluk agama Islam. Artinya pada kepemimpinan ini, PITI masih focus dengan kegiatan dakwah Islam, dan mulai mengembangkan kerjasama-kerjasama dengan kelompok Islam. Dari sinilah sebenarnya terlihat bahwasanya PITI ikut ambil bagian dalam Islam Mainstream, terutama terlihat dari kedekatan dan pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Agung Palembang. Menariknya pada masa kepemimpinan H Herryanto, masjid Cheng Ho mulai diresmikan. Masjid yang benuansa Tionghoa itu melambangkan integrasi antara Tionghoa dan Islam.

Pada tanggal 20 Mei 2008 (yang seharusnya diadakan tahun 2007) terjadi pergantian pimpinan melalui Muskorwil PITI Sumatera Selatan ke-III, yaitu H. Ahmad Affandi (Didi) sebagai ketua umum dan H. Hendra Kurniawan. SE, sebagai sekretaris umum. Tidak ingin membiarkan muallaf yang telah masuk Islam secara sadar dan telah mendapat hidayah begitu saja, H. Ahmad Afandi (Didi) menyiapkan sejumlah tempat dan ustadz untuk pembelajaran agama Islam secara gratis. Berapa tempat itu di antaranya adalah sekretaris DPW PITI Sumatera Selatan sekaligus kediaman pribadi, dan masjid Agung Palembang serta masjid Al-Islam Muhammad Chengho Jakabaring. Bagi muallaf yang ingin mempelajari agama Islam secara mendalam dan pribadi, ustadz-ustadz siap datang ke rumah-rumah secara gratis.

Di Palembang, PITI Sumatera Selatan yang bahkan baru aktif kembali pada setelah reformasi mengalami perkembangan yang pesat lambat laun keanggotaan PITI bertambah dan diklaim mencapai 4000 orang di Sumatera Selatan. Sama seperti PITI di Surabaya di Palembang mereka juga mendirikan masjid yang diberi nama Cheng Ho. Menariknya organisasi itu menambahkan nama Al Islam sebagai nama masjid di samping nama Cheng Ho. Menurut penulis yang juga salah satu anggota PITI dan dosen UIN Raden Patah, penamaan itu disertai dengan perdebatan, karena sebagian tidak ingin mengkultuskan Laksamana Cheng Ho dan alasan agar masjid tersebut tidak terkesan eksklusif.

Selanjutnya, di Masjid Al Islam Cheng Ho Palembang, kepengurusan membuka Pesantren dan Rumah Tahfidz yang diperuntukkan bagi siapapun tanpa memandang etnis tertentu. Selain itu, PITI Sumatera Selatan merupakan kepengurusan PITI yang menolak perubahan kepanjangan dari Pembina Iman Tauhid Indonesia menjadi nama semula yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dalam Musyawarah PITI ke III tahun 2005. Dari sini setidaknya menunjukkan bahwa PITI di Palembang cenderung menunjukkan ortodoksnya terhadap Islam mainstream. Mereka cenderung untuk menghindari kesan eksklusif dengan berupaya melakukan pendekatan terhadap kelompok Islam mainstream di kota itu, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai variasi-variasi pemahaman keagamaan di antara anggota PITI sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Di Palembang ditemukan bahwasanya identitas Muslim-Tionghoa dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tionghoa Muslim peranakan yaitu keturunan Muslim dari Tiongkok sejak abad ke 17-18 dan bukan dari hasil politik segregasi masa colonial, melainkan seiring upaya mereka mempertahankan identitas masa lalunya yang telah memiliki prestise sendiri dalam masyarakat Islam tradisional Palembang. Kelompok kedua adalah Tionghoa Muslim konversi yaitu kelompok Tionghoa non Islam yang konversi ke agama Islam. Kelompok ini diwakili oleh PITI Palembang. Kedua kelompok tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembinaan umat Islam di Palembang.

Daftar Pustaka

- Choi, Lee Khoon. 1979. *Indonesia: Myth and Reality*. Singapore: Educational Press
- Hanafiah, Johan. *Melayu Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Idi,Abdullah. *Bangka Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009
- Jacobsen., Michael,. *Islam and Processes of Minorisation among Ethnic Chinese in Indonesia: Oscillating between Faith and Political Economic Expediency*. Asian Ethnicity 6 (2): (2005: 71-87.)
- Koentjaraningrat, ed. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Penerbit Djambatan, 2002
- Idi,Abdullah. *Bangka Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009
- Parlindungan. *Tuanku Rao*. Jakarta: Penerbit Tandjung Pengharapan 1964
- Waluyo Waluyo dan Hasan Asyari. *Peran Kiyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam Penyebaran Islam di Kota Palembang*. Jurnal Kontekstualita (Vol 30 No 1 Tahun 2015